

PENDEKATAN DAN METODOLOGI PEMBELAJARAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh:
Uyu Wahyudin dan Yoyon Bahtiar Irianto*

Prawacana

Komitmen “setengah hati” terhadap Pendidikan Untuk Semua (*education for all*) disadari atau tidak merupakan penyebab terpuruknya dunia pendidikan kita. Keterpurukan itu semakin nyata dan memilukan bila berbicara pendidikan di daerah. Padahal jika kita bersepakat jumlah penduduk sebagian besar ada di daerah, maka perhatian pendidikan juga seyogyanya difokuskan pada problema pendidikan di wilayah ini. Kenyataan ini diperkuat dengan Deklarasi HAM (PBB,1948), Konvensi Hak Anak (PBB,1989), Konferensi Dunia (Thailand, 1990) telah menyepakati Pendidikan Untuk Semua; Aturan standard dunia tentang persamaan kesempatan (PBB,1993), Konferensi Dunia tentang pendidikan kebutuhan khusus (UNESCO,1994) yang melahirkan pernyataan SALAMANCA tentang pendidikan INKLUSI lebih dari cukup untuk bicara.

Pernyataan SALAMANCA misalnya menekankan bahwa hak semua anak tanpa kecuali untuk berpartisipasi dalam pendidikan yang *berkualitas* dan bermanfaat dan keyakinan bahwa pendidikan akan memberi semua anak dan orang dewasa rasa memiliki dan persahabatan serta akan membawa pada sebuah masyarakat inklusi pula. Namun kenyataannya, pendidikan kita kurang benar-benar ditargetkan untuk semua. Apalagi jika kita bicara kualitas. Semuanya masih memprihatinkan. Daya saing Indonesia menurun drastis dari peringkat ke 31 pada Tahun 1998 menjadi peringkat ke 37 pada Tahun 1999. Indonesia juga menempati urutan teratas dari 59 negara yang disurvei dalam hal kebokbrokan, yang diantaranya kebokbrokan sektor pendidikan. Berbagai kalangan masih senang berlindung dibalik anggaran pendidikan yang kurang, dan sederet alasan lainnya. Padahal jika berbicara *Education* maka itu tidak bisa dilepaskan dari aspek *kualitas SDM* dan tidak mungkin bicara *for all* jika ada *diskriminasi* apalagi ada penelantaran.

Data menunjukkan bahwa retensi kohort dari anak masuk SD yang langsung dapat melanjutkan pendidikannya sampai Perguruan Tinggi hanyalah 11,6%. Ini berarti sekitar 88,4% hanya dapat menyelesaikan pendidikannya sampai dengan SLTA, SLTP dan bahkan hanya SD. Sementara itu penduduk buta huruf juga masih cukup tinggi. Buta huruf usia 10 tahun ke atas

masih ada 18,7 juta orang (11%) dan usia 10-44 tahun tercatat 5,9 juta orang. Masih banyaknya penduduk buta huruf juga dikarenakan masih terus terjadinya siswa putus SD pada kelas 1, 2 dan 3 yang berkisar antara 250.000 s.d. 300.000 anak per-tahun. Kondisi demikian juga tidak terlepas dari masih kurangnya perhatian terhadap pendidikan prasekolah/pendidikan dini usia selama ini. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber yang dipercaya diketahui bahwa dari sekitar 26 juta anak usia 0-6 tahun yang ada, baru sekitar 7,5 juta (27%) yang terlayani pendidikannya melalui berbagai satuan pendidikan prasekolah/pendidikan dini usia. Khusus anak usia 4-6 tahun yang seluruhnya berjumlah 12,6 juta, masih ada sekitar 8 juta anak (63,4%) yang belum terlayani pendidikannya. Disinilah pentingnya peranan pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang untuk bersama-sama memperbaiki keadaan pendidikan kita sedini mungkin. Jelaslah kiranya bahwa wahana utama untuk pengembangan SDM adalah pendidikan.

Namun, gambaran data itu pun belum cukup untuk dijadikan informasi yang akurat sebagai bahan membuat kebijakan. Memang, data tentang pendidikan di negara kita juga sangat miskin, sehingga bisa dimengerti bila kebijakan pendidikan kurang menyentuh permasalahan sebenarnya. Apalagi diharapkan pada upaya memecahkan masalah-masalah pendidikan di daerah dan pelosok-pelosok negeri. Kerangka Aksi Dakar (KAD) yang diadopsi pada Forum Pendidikan Dunia (Dakar, Sinegal 26-28 April 2000) meminta pemerintah agar memastikan bahwa tujuan-tujuan dan target-target Pendidikan Untuk Semua (PUS) dapat tercapai pada Tahun 2015). Sebagai anggota UNESCO Indonesia telah bersepakat dengan targer PUS 2015, sehingga diperlukan kerjasama serius semua pihak.

Permasalahan

Di samping gambaran kondisi umum di atas, pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam bidang pendidikan dewasa ini merupakan sesuatu yang baru, yang memerlukan kecermatan dalam pelaksanaannya, agar tidak menimbulkan dampak negatif. Sekurang-kurangnya ada enam hal yang menjadi tantangan dalam dunia pendidikan kita dewasa ini, yaitu: kepentingan nasional, mutu pendidikan, efisiensi manajemen, pemerataan, peranserta masyarakat, dan akontabilitas.

Dalam aspek kepentingan nasional, hal pertama yang perlu diantisipasi adalah pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Kondisi kabupaten/kota sangat bervariasi ditinjau dari segi kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah. Tantangannya adalah bagaimana melalui otonomi daerah di masing-masing kabupaten/kota dapat menjamin wajib belajar 9 tahun dapat dituntaskan, sementara potensi dan kemampuan daerah berbeda-beda. Hal kedua, berkaitan

dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Dalam NKRI tersebut diperlukan adanya semacam *nation character building* sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya serta memiliki jiwa patriotisme, religius, dan lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dalam hal ini pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis. Dengan demikian, hal yang patut diantisipasi adalah bagaimana otonomi daerah dapat mengamankan program-program pendidikan yang memberikan peluang kreativitas dan keragaman daerah, tetapi semuanya mengarah kepada kepentingan nasional.

Dalam aspek peningkatan mutu, berkenaan dengan urgensi pemberian otonomi daerah, yang salah satunya adalah untuk menghadapi persaingan global. Krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai telah mengakibatkan angka pengangguran yang semakin meningkat, konon telah mencapai 40 juta, sehingga pendidikan perlu berperan aktif mengatasi masalah pengangguran ini. Dari dalam bidang pendidikan itu sendiri, diketahui terdapat 88,4% lulusan SLTA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, dan 34,4% lulusan SLTP tidak melanjutkan ke SLTA. Mereka perlu mendapat perhatian agar tidak menambah jumlah angka pengangguran yang sudah sedemikian besar. Kondisi-kondisi inilah yang diharapkan dapat diselesaikan melalui pendidikan. Setidaknya ada tiga kemampuan dasar yang diperlukan agar masyarakat Indonesia dapat ikut dalam persaingan global, yaitu: kemampuan manajemen, kemampuan teknologi, dan kualitas manusianya sendiri. Mutu yang diinginkan bukan hanya sekedar memenuhi standar lembaga, atau standar nasional semata-mata, tetapi harus memenuhi standar internasional.

Dalam aspek efisiensi manajemen, berkenaan dengan keterbatasan sumber pendanaan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan (*technical efficiency*) maupun efisiensi dalam mengalokasikan anggaran (*economic efficiency*). Pengalaman di beberapa negara seperti di Papua New Guinea dan Jamaica (Fiske, 1996) menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah, pembiayaan justru meningkat karena bertambahnya struktur organisasi daerah yang menambah lebih banyak personil pemerintahan tetapi tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal ini dapat dijadikan pelajaran, mengingat di Indonesia selama 32 tahun menganut sistem pengelolaan yang sangat sentralistik berpotensi munculnya problem-problem efisiensi pengelolaan seperti ini.

Dalam aspek pemerataan, berkenaan dengan peningkatan aspirasi masyarakat diperkirakan juga akan meningkatnya pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan. Tetapi

ini akan membutuhkan ongkos yang tinggi, dengan semakin tingginya jarak antar daerah dalam pemerataan fasilitas pendidikan, yang pada potensial memunculkan ketimpangan dalam perolehan mutu pendidikan. Tanpa intervensi manajemen, anggota masyarakat dari daerah kabupaten/kota yang kaya dengan umlah penduduk yang relatif sedikit, akan dapat menikmati fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik dari anggota masyarakat pada daerah kabupaten/kota yang miskin. Dan apabila kesempatan pendidikan ini juga mempengaruhi kesempatan untuk memperoleh penghasilan, maka dalam jangka panjang akan berpotensi meningkatnya jurang kesenjangan ekonomi antar daerah. Pangalaman pelaksanaan di Chili menunjukkan bahwa meningkatnya angka putus sekolah dikarenakan orang tua tidak mampu membiayai langsung pendidikan anaknya, sementara *opportunity costs* meningkat. Pengalaman ini mirip yang terjadi dengan kondisi di Indonesia.

Dalam aspek peranserta masyarakat, berkenaan dengan filosofi diberikannya otonomi kepada daerah. Peranserta masyarakat dalam pendidikan dapat berupa perorangan, kelompok, atau lembaga industri atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun, perlu diantisipasi bahwa peranan masyarakat tersebut cenderung terbatas pada lingkup kabupaten/kota yang bersangkutan. Karena itu, perlu juga intervensi kebijakan nasional yang dapat menerapkan subsidi silang supaya peranserta masyarakat dalam sistem desentralisasi tidak memperlebar jurang ketimpangan pemerataan fasilitas pendidikan antar daerah.

Aspek terakhir ialah dalam akontabilitas. Melalui otonomi, pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan jasa pendidikan semakin dekat dengan masyarakat yang dilayaninya, sehingga akontabilitas layanan tersebut bergeser dari yang lebih berorientasi kepada kepentingan pemerintah pusat kepada akontabilitas yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hal ini menuntut lebih besar partisipasi masyarakat dan orang tua dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan pendidikan di daerah masing-masing.

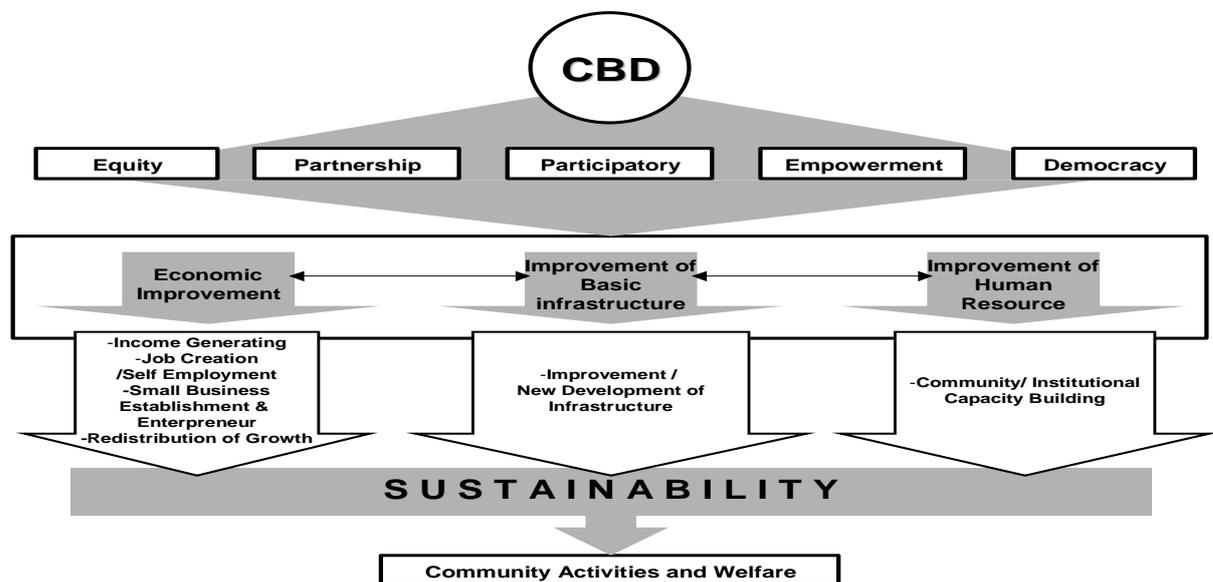
Pendekatan dan Metodologi Pembangunan

Tidak dipungkiri, salah satu pilihan dalam pendekatan pembangunan masyarakat dewasa ini berkembang ke arah *Community Based Development (CBD)*. Pendekatan ini dianggap mempunyai kemampuan dalam mendorong gerak masyarakat ke arah pemberdayaan dan kemandirian. Sehingga masyarakat mengalami pertumbuhan dan perkembangan terutama mengenai peningkatan prakarsa dan partisipasi, peningkatan kemampuan kelembagaan dan organisasinya yang berakar di masyarakat serta terciptanya jalinan sinergi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan melalui kemitraan antar kelembagaan masyarakat. Masyarakat

yang demikian itu diharapkan akan mengetahui pentingnya keputusan yang harus diambil masyarakat serta memahami apa saja konsekwensi, resiko, hak dan kewajiban dari keputusan yang diambilnya itu. Paling tidak, masyarakat pada tingkatan bawah (desa/kelurahan) makin peduli akan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Oleh karena itu gerakan masyarakat yang terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan dan dukungan dari pihak terkait, di antaranya pemerintah, swasta dan warga masyarakat luas. Mereka diharapkan menjalankan peran dan tanggung jawabnya bukan hanya sekedar objek pembangunan, namun juga sebagai pelaku pembangunan.

Pendekatan CBD merupakan alternatif pendekatan pembangunan yang menekankan pada pentingnya keberlanjutan (*sustainability*), baik pada hasil-hasil pembangunan itu sendiri maupun dampaknya terhadap system alam dan kehidupan social secara lebih luas. Oleh karena itu, CBD dilakukan dengan mengagungkan pilar-pilar yang dapat mengembangkan semua sumber daya menjamin keberlanjutan, sehingga pendekatannya lebih bottom up dan partisipasi. Secara skematik pola pikir CBD ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 : Strategi dan Pola Pikir CBD



Dalam wacana teoritik, memberikan gambaran bahwa kelebihan desentralisasi berkenaan dengan peranserta dan otoaktivitas masyarakat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, keanekaragaman daerah, pemahaman terhadap nilai-nilai dan aspirasi lokal, dan keputusan yang cepat dan tepat. Namun, kelemahan yang patut

dicermati berkenaan dengan disparitas antar daerah, pertumbuhan antar daerah tidak seimbang, tidak ada standarisasi dan pengendalian, dan potensial untuk disintegrasikan semakin kuat.

Pelibatan masyarakat pada suatu program intervensi dalam konteks pembangunan masyarakat didasarkan pada dua alasan berikut. *Pertama*, upaya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama yang peka dan aktif pada seluruh kegiatan yang terkait dengan substansi program berdasarkan: kondisi, sumber daya yang dimiliki dan potensi sumber daya yang dapat dikuasainya. *Kedua*, upaya memposisikan peran pemerintah sebagai fasilitator bagi masyarakat agar peran pelaku utama yang peka dan aktif tersebut dapat terwujud. Kedua alasan tersebut beranjak dari pandangan bahwa suatu program intervensi yang benar-benar melibatkan masyarakat akan mengarahkan kepada keberhasilan program itu sendiri dan sekaligus membangun masyarakat kelompok sasarannya.

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan mengandung pengertian bahwa seluruh aspek manajemen program tersebut pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian konteks pelibatan masyarakat dalam program tersebut bukan untuk mengarahkan masyarakat sebagai pelaksana tetapi memberikan kondisi agar masyarakat dapat melakukan pengembangan aspek program yang dibutuhkannya dan sekaligus memberikan perspektif terhadap kepentingan pembangunan yang lebih luas.

Fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dalam kerangka penguatan kemampuan dan potensi masyarakat (pembelajaran dan pemberdayaan serta pembaharuan masyarakat). Artinya, masyarakat diharapkan pada suatu proses yang terbuka bagi pemikiran dan ketrampilan baru. Sehingga dengan demikian pelibatan masyarakat akan merupakan media untuk terjadi proses penerimaan dan pengalihan kemampuan masyarakat dalam mengelola aspek program yang dibutuhkannya.

Pelibatan masyarakat dilihat sebagai upaya fasilitasi dari unsur di luar masyarakat akan terkait dengan aspek perilaku (*psiko-sosial*), budaya dan politik, dan mata pencaharian. Ketiga aspek atau dimensi tersebut saling mempengaruhi sehingga baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama akan berpengaruh terhadap tingkat kesiapan masyarakat untuk melibatkan diri atau dilibatkan dalam suatu program. Secara ilustratif ditunjukkan seperti pada Gambar 2.

Merujuk pada makna dasar dan dimensi yang terkandung di dalamnya maka hasil akhir dari proses pelibatan masyarakat dalam kerangka pembangunan yang berperspektif pemberdayaan adalah tumbuhnya: (1) *rasa memiliki* dari warga masyarakat termasuk kelembagaannya terhadap program intervensi yang dirancang atau diluncurkan oleh sector; (2)

kemandirian atau keswadayaan masyarakat baik sebagai penggagas, pelaksana maupun pemanfaat pembangunan, dan (3) *kepercayaan diri* yang mapan terhadap potensi, sumber daya dan kemampuan yang dimiliki untuk membangun dirinya sendiri.

Gambar 2 : Dimensi Pemberdayaan Masyarakat



Apabila kebijakan pembangunan masyarakat lebih menekankan kepada terwujudnya peranserta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat menjadi satu-satunya pilihan, maka persoalan sangat mendasar yang perlu diantisipasi adalah perbedaan persepsi antara para disainer program dengan keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat. Apa yang dianggap pemerintah diperlukan masyarakat dan kemudian dirumuskan ke dalam serangkaian program pembangunan belum tentu betul-betul dibutuhkan masyarakat.

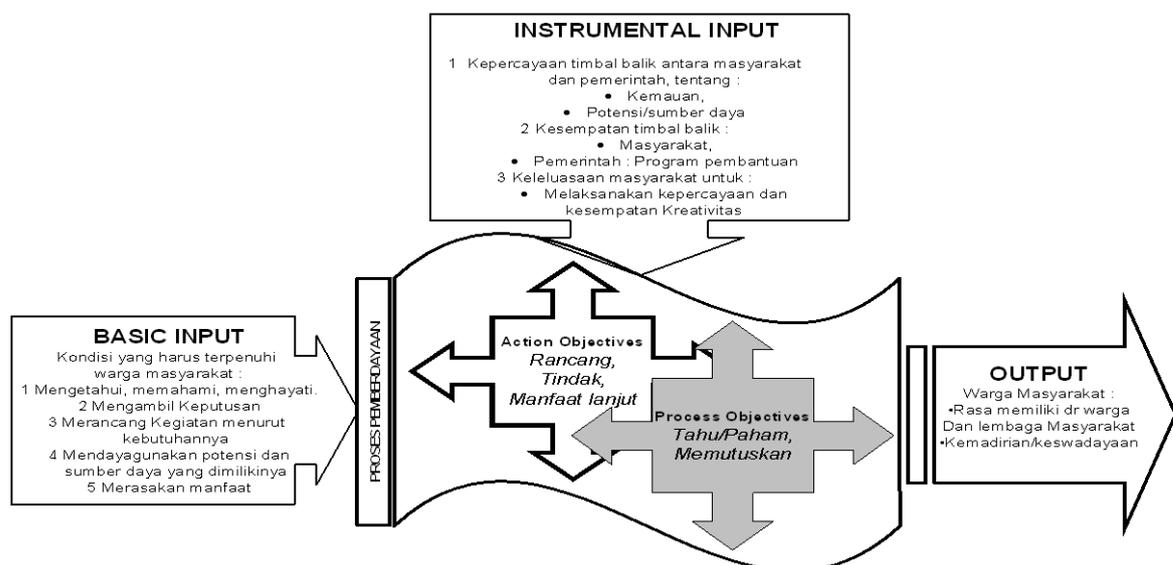
Dengan demikian, program pembangunan yang berbasis kemasyarakatan harus bercirikan: (1) ada kebijakan yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat; (2) ada sistem informasi yang melembaga dalam masyarakat dalam bentuk *community coalitions* atau semacamnya; (3) ada upaya penguatan kapasitas atau kemampuan aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan program; (4) ada transparansi keterpaduan visi dan misi program; (5) ada akuntabilitas program, dan (6) ada lembaga yang menjadi mitra kerja pelaksanaan program.

Keenam ciri tersebut akan muncul apabila: (1) masyarakat mengetahui akan kebutuhan, keinginan dan harapannya; (2) masyarakat mempunyai kesempatan dan keleluasaan untuk memutuskan keinginan, kebutuhan dan harapannya; (3) masyarakat memahami visi, misi, prinsip, dan tujuan program; (4) masyarakat mengetahui tugas dan perannya; (5) masyarakat mempunyai penggerak baik bersifat individual maupun kelembagaan; (6) masyarakat diberi kepercayaan untuk melaksanakan program bahwa mereka mempunyai potensi.

Guna tercapai keadaan masyarakat seperti itu, maka ditempuh dua tahapan kegiatan sebagai berikut: **Pertama**; proses *Objectivness*. Pada tahap ini kelompok masyarakat sasaran program difasilitasi untuk mengetahui dan memahami permasalahan mendasar yang mereka

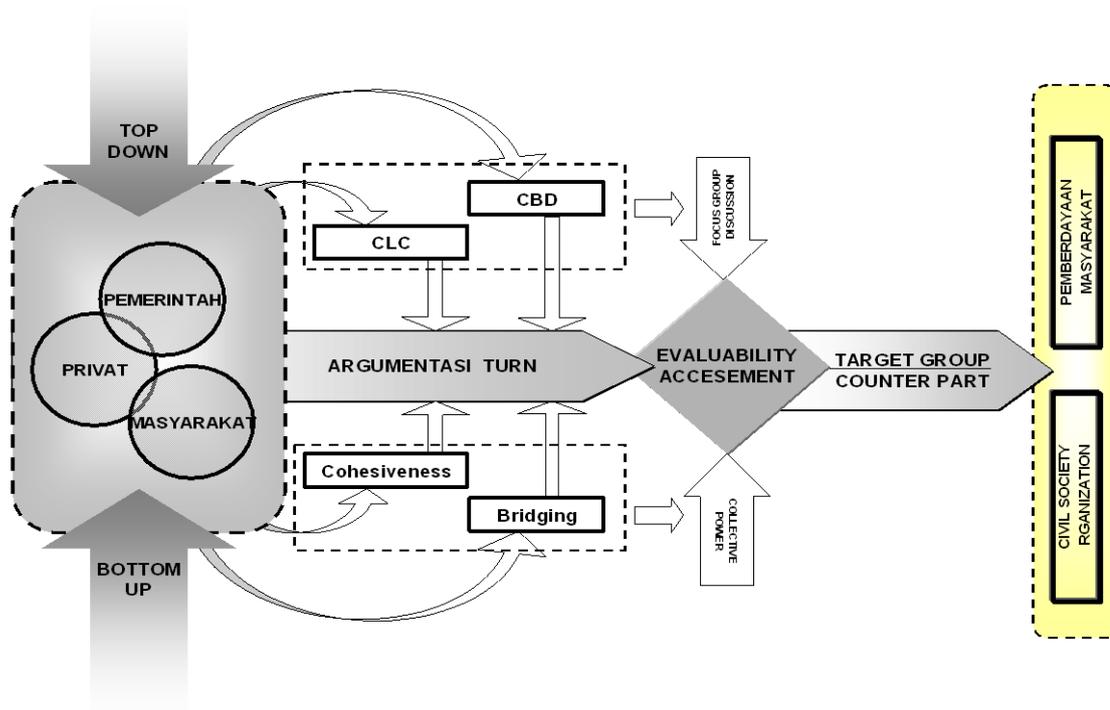
hadapi beserta sumberdaya yang dikuasainya. Berdasarkan pemahaman terhadap hal tersebut, masyarakat kelompok sasaran program memiliki cukup bahan masukan untuk memutuskan sendiri kebutuhan atau tujuan program yang akan dilakukannya. **Kedua; action objectives.** Berdasarkan keputusan tahap pertama selanjutnya masyarakat kelompok sasaran program difasilitasi untuk menetapkan sendiri peranannya dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhannya. Hal utama yang harus dicapai pada tahap ini adalah masyarakat kelompok sasaran program pembangunan ialah memahami dan menghayati secara jelas manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakannya sendiri terhadap peningkatan tarap hidupnya. Secara sederhana model konseptual metodologi pembangunan adalah seperti pada Gambar 3.

Gambar 3 : Model Konseptual CBD



Persenyawaan antara intervensi pemerintah dengan kemauan masyarakat melahirkan sinergi harapan (*Expected*) yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut diantaranya: (1) Menjadikan musyawarah untuk menjalin ikatan sosial kekompakan dan kebersamaan bagi perkembangan masyarakat; (2) Memprogram usaha penguatan usaha, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM); (3) Memprogramkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, langkah pengimplemntasian pendekatan CBD disederhanakan dalam Gambar 4.

Gambar 4 : Implementasi Konsep CBD



Perencanaan Stratejik Program Pendidikan

Dalam Kerangka Aksi Dakar (KAD) ada dua kondisi dasar yang harus dipenuhi dalam melaksanakan rencana-rencana PUS secara nasional.

Kondisi pertama, adalah kondisi nasional tertentu untuk pengembangan PUS (dan pengembangan sector pendidikan secara keseluruhan) harus ada dan berfungsi, termasuk diantaranya, kepemimpinan, konsultasi sistetik dengan masyarakat madani nasional, persiapan apa dan pelaksanaan pembaharuan dalam tujuan-tujuan PUS, kerangka pendanaan nasional yang dapat bertahan lama, serta keselarasan dan sinergi semua kegiatan pengembangan sumberdaya manusia di dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional.

Kondisi kedua, adalah rencana PUS yang terpercaya harus ada untuk kondisi-kondisi tersebut harus diterjemahkan ke dalam rencana dan program PUS nasional yang realistik dan mudah dilaksanakan. Tanpa rencana dan program yang kuat, negara-negara dan komunitas donor internasional mempunyai kesempatan kecil saja untuk menyaksikan tujuan-tujuan PUS dapat dilaksanakan. Rencana PUS nasional adalah suatu kondisi yang harus ada pada (sine quonon) untuk mencapai tujuan-tujuan PUS secara efektif.

Dengan demikian, memperhatikan beberapa tantangan sebagaimana dipaparkan di muka dan kedua persyaratan kondisi dalam rencana PUS tersebut, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan pendidikan yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan, baik yang menyangkut aspek politik, ekonomi, dan waktu, serta keterampilan mengenai pemahaman terhadap metoda ilmiah dan pengetahuan tentang nilai-nilai kontemporer, peka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Berdasarkan kepada kerangka konseptual CBD, maka strategi operasional program pendidikan, sebagai berikut:

Pertama, aktivitas fasilitasi langsung sebagai modus intervensi dari pihak Sentra-Sentra Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (SPPM) paling jauh dilakukan terhadap pelaksanaan tugas sebagai fasilitator. Hal ini dilakukan untuk memberikan keleluasaan pelaksanaan kompetensi dalam mendorong kemandirian masyarakat untuk menjamin kesinambungan (*sustainability*) proses pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Monitoring yang dilakukan oleh SPPM di tingkat Satuan Program Pendidikan Masyarakat dan Pusat-Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat (PKBM) lebih diarahkan kepada standarisasi proses dan hasil (berdasarkan desain program) dari kegiatan yang dilakukan oleh kelembagaan masyarakat.

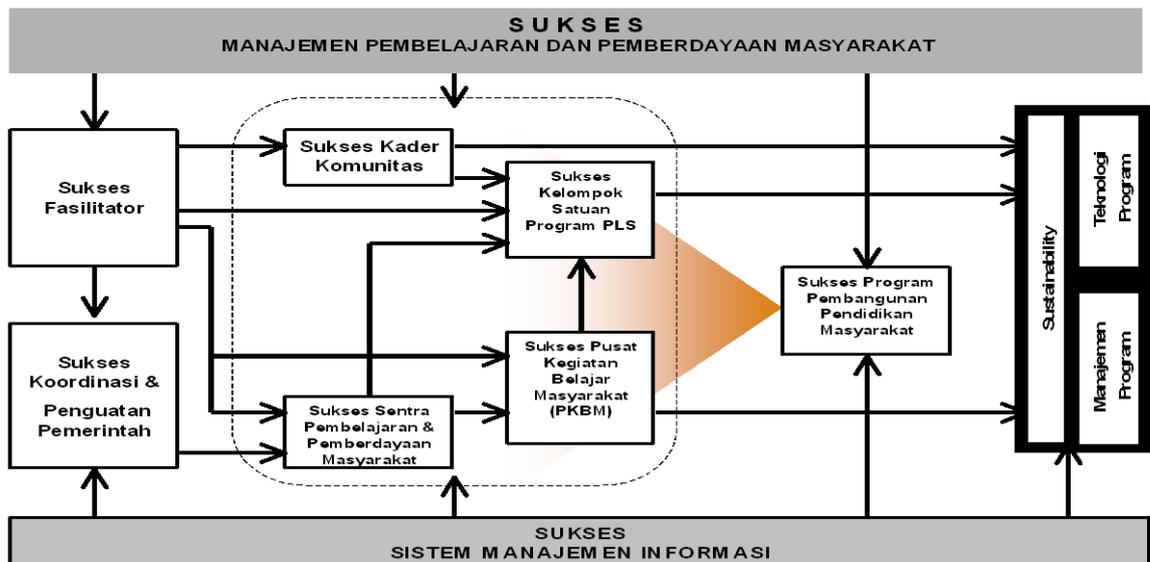
Kedua, menempatkan posisi SPPM sebagai agen kuat dalam penciptaan kemandirian dan keswadayaan kelompok-kelompok satuan program pendidikan atau PKBM. Oleh karena itu pemilihan (*rekrutment*), penyiapan dan pendampingan lembaga-lembaga yang menjadi fasilitator dilakukan dengan berorientasi kepada: (1) Pemahaman yang mendasar, kuat dan luas dari PKBM terhadap karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat kelompok sasaran program. (2) Penyiapan kompetensi yang kuat untuk mendukung pelaksanaan tugasnya di lapangan. (3) Transformasi teknologi pemberdayaan masyarakat dari pihak lembaga-lembaga pembina kepada PKBM yang dilakukan dalam kerangka penyiapan kemampuan (*enabling*) melaksanakan program lebih lanjut. Secara Skematik strategi operasional ini dapat dilihat pada Gambar 5.

Penguatan Kelembagaan PKBM sebagai Prioritas

Mengingat kompleksitas permasalahan, luas sasaran dan keberagaman kebutuhannya, maka model-model pendidikan yang diarahkan pada penguatan masyarakat sivil (*civil society organization*) merupakan pilihan yang perlu dikedepankan. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat pendidikan yang berbasis masyarakat (*community learning center/CLC*) adalah pendidikan yang fleksibilitasnya tinggi dan merupakan pendidikan yang paling dianggap demokratis. Model-model pendidikan ini sebetulnya dapat dilembagakan oleh prakarsa dan

partisipasi bersama, tanggungjawab bersama, untuk produktivitas dan kepentingan bersama, secara perorangan atau berkelompok. Model pendidikan seperti ini dapat menunjukkan jati dirinya sebagai pendidikan yang kontekstual dengan kebutuhan pasar, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan dunia industri, kebutuhan pembangunan. Program-programnya dapat disusun sesuai dengan jenis, mutu dan tingkat kebutuhan nyata warga belajar dan lingkungannya.

Gambar 5 : Pola Pikir Indikator Sukses Program PPM



Di Indonesia dewasa ini, pembangunan pendidikan melalui model CLC secara bertahap terus dipacu dan diperluas guna memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak mungkin dapat terlayani melalui jalur pendidikan sekolah. Sasaran pelayanan pendidikan CLC yang diimplementasikan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diprioritaskan kepada warga masyarakat yang tidak pernah sekolah, putus sekolah penganggur/miskin dan warga masyarakat lainnya yang ingin belajar untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya sebagai bekal untuk dapat hidup lebih layak.

Hasil identifikasi yang dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Jawa Barat bekerjasama dengan UNESCO Jakarta pada Tahun 2001 terhadap layanan pendidikan melalui PKBM (kasus di Provinsi Jawa Barat), diperoleh informasi bahwa permasalahan PKBM khususnya yang diselenggarakan oleh masyarakat (PKBM Berbasis Masyarakat) berkisar pada pengelolaan dan pengendalian mutu PKBM itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan manajerial pengelola, penyelenggara program dan tutor di PKBM, serta lemahnya partisipasi komponen terkait di luar

PKBM, sehingga kurang optimalnya mekanisme sistem penyelenggaraan pendidikan dimana PKBM berbasis masyarakat itu berada.

Diakui atau tidak, sebenarnya PKBM merupakan tempat pembelajaran dan tempat sumber informasi bagi masyarakat yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat. Wadah ini berisi berbagai jenis keterampilan fungsional yang berorientasi pada pembelajaran potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. PKBM yang berbasis masyarakat minimal memiliki 2 (dua) fungsi, yakni: **Pertama**, fungsi utama sebagai wadah berbagai kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan masyarakat. **Kedua**, fungsi pendukung diantaranya sebagai pusat informasi bagi masyarakat sekitar, bagi lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, pusat jaringan informasi dan kerjasama, tempat koordinasi, konsultasi, komunikasi dan bermusyawarah, serta sebagai tempat kegiatan penyebarluasan program dan teknologi tepat guna.

PKBM ini akan terwujud sesuai fungsinya jika minimal melaksanakan empat bidang kegiatan seperti pendidikan, pelayanan informasi, jaringan informasi dan kemitraan serta pembinaan tenaga kependidikan, yang pada operasionalnya didukung pula oleh fasilitas/sarana prasarana yang perlu disiapkan oleh pengelola untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan PKBM tersebut. Keberhasilan PKBM juga sangat ditunjang oleh kegiatan pembinaan dari pihak terkait dalam rangka pengendalian mutu program. Pihak tersebut diantaranya aparat desa, tokoh masyarakat setempat, pemerintahan tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, penilik Diklusepora, pamong SKB dan lembaga lainnya yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan PLS. Oleh karena itu, memandang perlu diberi penguatan berkenaan dengan sistem penyelenggaraan PLS berbasis PKBM ditingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota, sehingga PKBM dapat terpantau, terbina serta terkendali sesuai dengan fungsinya.

Menurut SMM PKBM Berbasis Masyarakat (BPKB Jayagiri, 2001), memberi isyarat bahwa bentuk pengaturan dan tata cara menyelenggarakan PLS berbasis PKBM pada tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten dapat diawali melalui inisiatif pengelola PKBM melalui: (1) bidang pelayanan informasi dalam rangka sosialisasi dan promosi PKBM, (2) bidang pembinaan tenaga teknis yang berorientasi pada pemecahan masalah pelaksanaan tugas, (3) pemantauan dan pengendalian melalui forum reguler dalam rangka pengendalian dan evaluasi yang melibatkan unsur pengelola, tenaga kependidikan/tutor, nara sumber, pembina teknis serta unsur lain yang relevan.

Merujuk pada hal tersebut di atas, maka pendekatan dan metodologi dalam pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sudah selayaknya memprioritaskan pada penguatan sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis CLC di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan, sehingga setiap unsur pemerintah daerah dan masyarakat memahami dan mengerti tentang fungsi, peran dan kegiatan yang harus dilakukannya dalam rangka mengoptimalkan fungsi PKBM khususnya yang berada di wilayah garapannya masing-masing.

Penutup

Sebagai penutup tulisan ini ingin ditegaskan bahwa model pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat merupakan pilihan yang tidak bias ditawarkan lagi bagi unsur pembuat kebijakan dan *stakeholder*. Program-program pelayanan pendidikan, jaringan informasi, kemitraan, pembinaan, evaluasi dan kesekretariatan untuk kemajuan masyarakat minimal di sekitar lingkungan lokasi PKBM serta mekanisme koordinasi berikut peran-pemerannya dalam mendukung semua aktivitas/ kegiatan yang telah direncanakan oleh para pengelola PKBM.

Model pendekatan dan metodologi pembelajaran dan pemberdayaan ini lebih mengutamakan pada mekanisme kerja *stakeholder* sesuai tuntutan manajemen PKBM dan kejelasan posisi PKBM dalam sistem penyelenggaraan pendidikan pada tingkat desa dan kecamatan. Inisiatif mengembangkan jaringan informasi dan kemitraan memungkinkan lebih dominan diperlukan oleh para pengelola PKBM. Sedangkan pada aspek pembinaan lebih banyak diperankan oleh penilik PLS, generasi muda dan olahraga, serta kebijakan-kebijakan berikut pendukung lainnya oleh *stakeholder* tingkat desa dan tingkat kecamatan lokasi PKBM berada.

Dengan demikian, peran PKBM pada sistem pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sangat strategis, karena berperan penuh untuk mengelola program sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi pendukung dari lingkungan sekitarnya. Mekanisme kerja dan peran pemeran dari pemegang kebijakan tingkat desa maupun tingkat kecamatan telah diuraikan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dengan memperhatikan keterkaitan posisi dalam jabatan pekerjaan rutinnya.

Rujukan

Abin Syamsuddin Makmun, (1998), "Analisis Posisi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan", *Materi Pelatihan Perencanaan Pendidikan*, Jakarta: Biro Perencanaan Depdikbud.

Bahtiar Irianto, Yoyon, (1997), *Konsep dan Teori Sistem*, Bandung: FIP IKIP Bandung.

- Banghard, Frank W., & Albert Trull Jr., (1973), *Education Planning*, New York: The Macmillan Co.
- Beeby, C.E., (1981), *Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- BPKB Jawa Barat, *Standar Minimal Manajemen (SMM) PKBM Berbasis Masyarakat*. BPKB Jawa Barat, Bandung, 2001.
- Depdikbud, *Pembentukan dan Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Kelompok Pemuda Produktif dan Olahraga Masyarakat*, Diktentis, Jakarta, 1998.
- _____, *Peraturan Pemerintah No,73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah*. Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Education Sector Unit East Asia and Pacific Regional Office, (1998), *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery*, September 23, Jakarta: Sesjen Depdikbud.
- Fiske, Edward B., (1996), *Decentralization of Education: Politics and Consensus*, Washington Dc: The World Bank.
- Mendagri RI, *Tugas Pokok Pemerintahan Desa dan Kecamatan*, Pemda Jawa Barat, Bandung, 2001.
- Patton, Carl V. & David S. Sawicki, (1986), *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs.
- Salis, Edward B, (1996), *Total Quality Management in Education*, London: Kogan Page.
- Sudjana, Nana. *Pendekatan Sistem Bagi Administrator Pendidikan*. Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Trismansyah, Sutaryat, *Action Research dan Aplikasinya dalam Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah*, Gita Setra BPKB Jayagiri, Bandung, 1995.

*Uyu Wahyudin, Drs., M.Pd., dan Yoyon Bahtiar Irianto, Drs., M.Pd., Dosen pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)-UPI, Direktur dan Sekretaris Eksekutif Yayasan SWADAMAS Jayagiri, Lembang, Bandung.